

ANALISIS DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL DAN TINGKAT KEMANDIRIAN
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN ERA OTONOMI DAERAH
(PERIODE 2001-2006)

NURCAHYONO , DAVID

PEMBIMBING : Prof. Dr. Djoko Mursinto, SE, M.Ec

AUTONOMY ; FINANCE , PUBLIC

KKB KK-2 C 121 / 08 Nur a

Copyright : @ 2008 by Airlangga University Library Surabaya

Abstrak

Keinginan untuk mengembangkan diri bagi daerah melalui suatu konsep yang dinamakan desentralisasi telah muncul pada akhir dekade 1980-an, dan mulai gencar didengungkan terutama pada awal dekade 1990-an. Diikuti dengan adanya keinginan untuk meningkatkan kemandirian dalam perekonomian daerah melalui wacana otonomi daerah. Di Indonesia sendiri, pada 1 Januari 2001 mulai diberlakukan otonomi daerah yang didasarkan pada UU No. 22 tahun 1999 yang mengatur tentang pemerintah daerah dan UU No. 25 tahun 1999 yang mengatur antara perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Otonomi daerah yang didasarkan atas asas desentralisasi dalam wujud otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab menuntut setiap daerah untuk lebih terdorong untuk membenahi dan mengembangkan pola berpikir aktif dalam membangun daerahnya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kondisi keuangan daerah kabupaten Lamongan dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal serta mengetahui kontribusi PAD (Pendapatan Asli Daerah) terhadap APBD (Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah) Kabupaten Lamongan, mengetahui tingkat kemandirian keuangan daerah, elastisitas PAD terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), serta posisi fiskal Kabupaten Lamongan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif melalui indikator rasio kinerja keuangan daerah seperti derajat desentralisasi fiskal, tingkat kemandirian keuangan daerah, elastisitas keuangan daerah, posisi fiskal daerah. Hasil analisis menunjukkan bahwa derajat desentralisasi fiskal adalah sebesar 6,26% dan tingkat kemandirian keuangan daerah sebesar 7,52% yang menunjukkan nilai yang rendah sekali (kurang dari 25%) dan mempunyai pola hubungan instruktif, sehingga dapat dikatakan bahwa Kabupaten Lamongan belum mampu melaksanakan otonomi daerah. Koefisien elastisitas PAD terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku sebesar 1,67% dan koefisien elastisitas PAD terhadap PDRB atas dasar harga konstan sebesar 4,27%; maka dapat dinyatakan elastis ($e > 1$) yaitu perubahan PAD akan peka terhadap perubahan PDRB yang terjadi. Selama periode pengamatan posisi fiskal menunjukkan nilai rasio dibawah 1, artinya posisi fiskal Kabupaten Lamongan sangat rendah.

Kata Kunci : Desentralisasi fiskal, Otonomi daerah, Derajat Desentralisasi Fiskal, Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, Tingkat Elastisitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Posisi Fiskal Daerah, Kabupaten Lamongan.

Abstract

Desire to develop region by concept a decentralization have borned by the end of decade 1980-an, and start intensively in the early decade 1990-an. Followed with existence of desire to increase self-supporting in economics of area at regional autonomy periods. In Indonesia, since 1 January 2001 starting implementation otonomy of area that according by on UU No. 22 year 1999 who rules about local government and of UU No. 25 year 1999 who rules monetary counter balance between central government and local government. Otonomy of area based from decentralize in the form of wide autonomy, reality, and responsibility to push every region to correct and develop active way of thinking for developing its region.

Target of this research is to analyse the finance condition for region of Lamongan in order to execution regional autonomy and fiscal decentralization and also know contribution of PAD (original regional revenue) to APBD (regional budget income and expenditure) by region of Lamongan knowing level of self-supporting monetary region, elasticity of PAD to PDRB (Gross Domestic Regional Product), and also fiscal position region of Lamongan.

This research uses quantitatives and qualitatives approach with indicator of monetary region counter balance ratio like as degree of fiscal decentralization, level of self-supporting monetary region, elasticity PAD to PDRB, and also fiscal position of region. Result of analyse to show that degree of fiscal decentralization is 6.26% and level of self-supporting monetary region is 7,52% that to show result very low (less than 25%) and have instructive category, so region of Lamongan not yet to do region autonomy very well. Coefficient elasticity of PAD to PDRB based in price effect is 1,67% dan coefficient elasticity based in constant price is 4,27%; so this result is elastic ($e > 1$) wherever change of PAD can make change PDRB. In research of periode, fiscal position to show result less than 1, is fiscal position region of Lamongan is very low.

Keyword : Fiscal Decentralization, Region Autonomy, Degree of fiscal decentralization, level of self-supporting monetary region, elasticity of original regional revenue (PAD). Gross Domestic Regional Product (PDRB), Fiscal Position of Region, Region of Lamongan.